

IDENTIFIKASI PENYEBAB RENDAHNYA PENYALURAN KREDIT USAHATANI

(Kasus Beberapa KUD di Sulawesi Selatan)

Oleh:

Nizwar Syafa'at dan Achmad Djauhari¹⁾

Abstrak

Walaupun petani masih membutuhkan modal untuk membiayai usahatani, namun kredit sarana produksi berupa KUT yang disediakan pemerintah tidak dapat dimanfaatkan petani seperti yang diharapkan, sehingga penyaluran KUT rendah. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab rendahnya penyaluran KUT. Salah satu penyebab rendahnya penyaluran KUT adalah adanya kemacetan yang bersifat struktural akibat tidak diperbolehkannya KUD mengambil kredit berikutnya apabila tunggakan kredit sebelumnya melebihi 20 persen. Penelitian ini menyarankan (1) perlunya perubahan aturan tersebut yaitu penyaluran kredit berikutnya berdasarkan pada jumlah kredit sebelumnya yang sudah dikembalikan. Cara tersebut diharapkan dapat memberi jaminan kredit yang berkelanjutan bagi petani yang telah melunasi dan dapat menciptakan kondisi yang mampu mendorong petani untuk tetap berpartisipasi pada KUD, (2) perlu terus dilakukan upaya penyesuaian antara paket KUT dengan kebutuhan petani dan perlu dipertimbangkan obat-obatan menjadi paket yang sifatnya kondisional. Saran yang terakhir ini ditujukan untuk mengurangi tunggakan KUT.

PENDAHULUAN

Intensifikasi masih memegang peranan penting dalam peningkatan produksi padi nasional (Syafa'at, 1989). Namun dalam perkembangannya, intensifikasi mengalami kendala yaitu rendahnya kemampuan modal petani, sehingga mereka tidak selalu mampu mengadopsi teknologi intensifikasi secara sempurna. Rendahnya kemampuan modal petani tersebut diperlihatkan oleh tingginya persentase petani yang masih memerlukan modal untuk kegiatan usahatani yaitu antara 35 – 55 persen (Soentoro dan Bahri, 1988).

Keadaan tersebut sudah disadari oleh pemerintah dan telah dilakukan upaya peningkatan kemampuan modal petani melalui Kredit Usaha Tani (KUT). Kredit tersebut disalurkan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Namun kenyataannya penyaluran KUT tersebut masih rendah sekitar 21 persen (Irawan dan Syafa'at, 1989). Fakta tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi, dimana petani membutuhkan modal, sedangkan kredit yang disediakan tidak dapat diserap. Kendala apa saja

yang menyebabkan rendahnya penyerapan KUT tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya penyaluran KUT dengan memfokuskan pada kajian lembaga penyalur yaitu KUD dan paket teknologi yang diperkenalkan melalui KUT.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pikiran

Kredit merupakan salah satu faktor pelancar dalam aktivitas ekonomi (Mosher, 1966). Pemberian kredit dapat membantu mengatasi kendala modal bagi pelaku ekonomi sehingga aktivitas produksi dapat ditingkatkan.

¹⁾ Staf Peneliti, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Pemberian kredit di sektor pertanian ditujukan untuk meningkatkan kemampuan modal petani dalam melaksanakan usahatani sehingga mereka mampu menerapkan teknologi yang disarankan. Dampak positif dari penerapan teknologi tersebut adalah peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian pemberian kredit di sektor pertanian diharapkan mampu meningkatkan produksi pertanian.

Pemberian kredit sarana produksi diawali dengan dicetuskannya program Bimas padi. Peserta Bimas pada periode 1970–1978 telah meningkat dua kali lipat bersamaan dengan itu luas areal meningkat dua kali lipat dan produksi beras meningkat rata-rata 3,6 persen per tahun (Tatuh, 1986). Namun dalam perkembangan, penyaluran kredit sarana produksi melalui Bimas mengalami kemacetan karena banyaknya tunggakan. Menurut Saefudin (1980) macetnya pengembalian kredit Bimas karena kepentingan nasional dirasa belum senada dengan kepentingan petani sendiri. Kredit Bimas (formal) dirasa oleh petani belum sesuai dengan kebutuhannya dan kurang fleksibel dalam penggunaannya serta prosedur berbelit-belit. Petani terkadang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengambil kredit, sehingga tingkat bunga efektif menjadi tinggi. Sebaliknya kredit non formal dipandang oleh petani sebagai kredit yang fleksibel dalam penggunaannya sehingga sesuai dengan kebutuhan petani dan prosedurnya tidak berbelit-belit. Keadaan itu menyebabkan petani banyak terlibat dalam perkreditan non-formal walaupun bunga kredit tersebut relatif lebih tinggi (Irawan dan Syafa'at, 1989).

Menyadari pentingnya kredit sarana produksi dalam peningkatan produksi pertanian, pemerintah mencoba memperbaiki prosedur pelayanan kredit tersebut. Pola kredit Bimas dirubah menjadi pola KUT dimana kredit sarana produksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan petani dan prosedur pengambilan kredit dibuat sedemikian mudah serta bunganya relatif rendah di bawah bunga pasar yaitu sekitar 12 persen. Namun kenyataannya penyerapan KUT tersebut tetap rendah.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di empat kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Sidrap, Wajo, Bone dan Luwu. Untuk memperoleh gambaran mengenai masalah penyaluran KUT oleh KUD, maka dipilih satu KUD untuk masing-masing kabupaten. Pemilihan KUD tersebut bersifat pur-

posive dengan pertimbangan volume penyaluran KUT besar dan tunggakan besar. Dari masing-masing KUD contoh, dipilih satu kelompok tani penyalur KUT untuk diwawancarai (*group interview*) untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi paket teknologi usahatani padi melalui KUT.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari instansi pemerintah dan KUD, sedangkan data primer berasal dari kelompok tani. Data sekunder meliputi data perkembangan penyaluran KUT dan produksi padi, sedangkan data primer meliputi data persepsi petani mengenai paket teknologi usahatani melalui KUT.

Analisis terhadap data tersebut dilakukan secara deskriptif dan tabulasi silang untuk mengidentifikasi penyebab rendahnya penyaluran KUT.

PERANAN KUT DALAM PENGEMBANGAN USAHATANI PADI

Seperti diketahui bahwa KUT merupakan kredit sarana produksi yang meliputi benih, pupuk dan obat-obatan. Pemberian KUT kepada petani diharapkan dapat meningkatkan penggunaan sarana produksi tersebut, sehingga produksi dapat meningkat. Dengan demikian peranan KUT dalam pengembangan usahatani dapat dilihat dari peningkatan penggunaan sarana produksi dan produktivitas.

Keragaan penggunaan pupuk dan obat-obatan serta penyaluran KUT disajikan pada Tabel 1. Pada tahun 1987–1988 penyaluran KUT meningkat dari Rp 1.256.960.000 menjadi Rp 7.073.295.000. Peningkatan penyaluran KUT ini juga diikuti oleh peningkatan pemakaian pupuk dan insektisida per hektar yaitu Urea/ZA, TSP/KCl dan Insektisida masing-masing dari 165,11 kg menjadi 177,48 kg; 67,20 kg menjadi 86,06 kg; dan dari 0,80 kg/lt menjadi 0,83 kg/lt. Sebaliknya penurunan penyaluran KUT pada tahun 1988–1989 dari Rp 7.073.295.000 menjadi Rp 6.659.548.000 juga diikuti oleh penurunan pemakaian pupuk Urea/ZA dan Insektisida masing-masing dari 177,48 kg menjadi 168,46 kg dan 0,83 kg menjadi 0,79 kg. Tetapi pemakaian pupuk TSP/KCl meningkat dari 86,06 kg menjadi 87,09 kg, namun peningkatan tersebut tidak terlalu besar.

Tabel 1. Perkembangan penyaluran KUT dan penggunaan pupuk pada Insus di Sulawesi Selatan (MT 1987-MT 1988).

Musim tanam	Penyaluran KUT (Rp.000)	Penggunaan/ha		
		Urea/ZA (kg)	TSP/KCl (kg)	Insektisida (liter)
1987	1.256.960	165,11	67,20	0,80
1988	7.073.295	177,48	86,06	0,83
1989	6.659.548	168,46	87,09	0,79

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1988, 1989 dan 1990.

Tabel 2. Perkembangan penyaluran KUT dan peranan Insus terhadap luas panen dan produksi serta produktivitas padi di Sulawesi Selatan (1986-1989).

Tahun	Penyaluran KUT (Rp 000)	Persentase terhadap total		Produktivitas (ton/ha)
		Luas panen (%)	Produksi (%)	
1986	263.512			
		37,38	48,79	5,14
1986/87	730.577			
1987	1.256.960			
		55,91	65,76	5,40
1987/88	6.386.341			
1988	7.073.295			
		70,17	77,91	5,06
1988/89	10.525.499			

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1988, 1989 dan 1990.

Peranan intensifikasi khusus (Insus) selama kurun waktu 3 tahun terhadap produksi padi di Sulawesi Selatan meningkat tajam, kalau pada tahun 1986 peranan Insus terhadap produksi padi di Sulawesi Selatan sebesar 48,79 persen, maka pada tahun 1988 telah meningkat menjadi 77,91 persen. Produktivitas Insus juga meningkat dari 5,14 ton/ha pada tahun 1988 menjadi 5,66 ton/ha pada tahun 1988. Peningkatan peranan Insus ini sejalan dengan peningkatan penyaluran KUT. Kalau pada tahun 1986 penyaluran KUT hanya sebesar Rp 263.512.000, maka pada tahun 1988/1989 telah meningkat menjadi Rp 10.525.499.000 (Tabel 2). Kenyataan ini menunjukkan bahwa peranan kredit dalam pengembangan usahatani padi masih diperlukan dan hasil ini sesuai dengan temuan Soentoro dan Syaiful (1988), Irawan dan Syaifa'at (1989) bahwa para petani Sulawesi Selatan masih membutuhkan kredit dalam pengembangan usahatani padi.

PENGARUH TUNGGAKAN TERHADAP PARTISIPASI KUD DALAM PENYALURAN KUT

KUD merupakan satu-satunya lembaga yang menyalurkan KUT. Dengan demikian partisipasi KUD dalam KUT akan mempengaruhi penyaluran KUT. Salah satu aturan KUT menyebutkan bahwa KUD tidak boleh ikut berpartisipasi untuk penyaluran kredit berikutnya apabila tunggakan kredit sebelumnya melebihi 20 persen.

Realisasi penyaluran KUT di Sulawesi Selatan selama periode musim tanam (MT) 1985-1988/1989 mengalami peningkatan pesat, tetapi setelah itu mengalami penurunan. Realisasi penyaluran KUT pada MT 1989 hanya sebesar 69 persen sedangkan MT 1988/1989 sebesar 80 persen. Penurunan realisasi penyaluran KUT juga diikuti oleh penurunan partisipasi KUD pada tahun 1989 menjadi 60 persen dibanding MT 1988/1989.

Rendahnya partisipasi KUD dalam penyaluran KUT tersebut karena mereka tidak diperkenankan mengambil kredit KUT pada musim berikutnya yang disebabkan besarnya tunggakan yang melebihi 20 persen pada MT sebelumnya. Dengan demikian besarnya tunggakan KUT MT sebelumnya sangat mempengaruhi besarnya penyaluran kredit untuk MT berikutnya (Tabel 3). Kasus di empat kabupaten contoh memperlihatkan fenomena yang sama (Tabel 4). Tunggakan KUT di kabupaten Sidrap pada MT 1988/1989 yang melebihi 20 persen yaitu sebesar 29,35 persen, diikuti

oleh partisipasi KUD dalam penyaluran KUT MT berikutnya menurun menjadi 90 persen dibanding MT sebelumnya. Begitu juga dengan kasus di kabupaten Wajo, dimana tunggakan pada MT 1988 sangat besar yaitu 81,83 persen menyebabkan dihentikannya untuk sementara penyaluran KUT yang berarti pada MT berikutnya tidak ada partisipasi KUD. Sebaliknya, tunggakan KUT di kabupaten Bone hanya sebesar 10,27 persen menyebabkan meningkatkan partisipasi KUD sebesar 140 persen dibanding MT sebelumnya.

Tabel 3. Realisasi penyaluran dan tunggakan KUT di Sulawesi Selatan (1985-1989).

Tahun	Penyaluran		KUD yang berpartisipasi	KUD yang menunggak		Tunggakan	
	Nilai (Rp.000)	Realisasi (%)		Jumlah	%	Jumlah	%
1985	50.811	-	12	-	-	-	-
1985/86	399.895	-	44	1	2,27	5.863	1,47
1986	263.512	-	21	-	-	-	-
1986/87	730.577	-	21	2	9,52	11.758	1,61
1987	1.256.960	-	53	5	9,43	27.145	3,16
1987/88	6.386.341	-	165	53	32,12	1.042.713	16,33
1988	7.073.295	-	143	52	36,36	1.636.859	23,13
1988/89	10.525.499	68,64	234	95	41,00	2.627.859	24,97
1989	6.859.548	80,18	141	-	-	4.155.299	60,58

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 1986, 1987, 1988, 1989 dan 1990.

Tabel 4. Penyaluran, realisasi, tunggakan dan partisipasi KUD pada KUD di empat kabupaten Sulawesi Selatan (1987-1989/1990).

Kabupaten	Musim Tanam					
	1987	1987/88	1988	1988/89	1989	1989/90
Sidrap						
- Penyaluran (Rp.000)	586.687	1.566.295	2.279.234	2.071.517	1.767.210	1.455.250
- Realisasi (%)	(86,02)	(94,55)	(95,47)	(83,16)	(79,60)	(80,40)
- Tunggakan (%)	(0)	(0)	(6,65)	(29,35)	(93,41)	(99,62)
- KUD	5	23	23	21	21	17
Wajo						
- Penyaluran (Rp.000)	-	100.500	240.240	0	516.889	0
- Realisasi (%)	-	(100)	(100)	0	(91,61)	0
- Tunggakan (%)	-	(17,04)	(81,83)	0	(64,93)	0
- KUD	-	8	19	0	9	0
Bone						
- Penyaluran (Rp.000)	30.193	38.005	-	78.859	96.131	186.411
- Realisasi (%)	(80,40)	(89,63)	-	(91,10)	(46,91)	(74,66)
- Tunggakan (%)	(51,87)	(0)	-	(10,27)	(37,67)	(99,05)
- KUD	3	3	-	5	7	7
Luwu						
- Penyaluran (Rp.000)	433.500	-	1.840.279	1.158.250	1.655.783	2.967.682
- Realisasi (%)	(100)	-	(94,16)	-	-	(83,44)
- Tunggakan (%)	(0)	-	(1,78)	(2,6)	(19)	-
- KUD	19	-	31	31	31	31

Sumber: Laporan Tahunan Kantor Departemen Koperasi Tahun 1988, 1989, 1990 masing-masing Kabupaten.

Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa KUD tidak mempunyai dana cadangan yang mencukupi untuk menanggulangi kredit yang macet sampai batas 20 persen. Kalau hal tersebut dibiarkan tentunya akan menimbulkan kemacetan yang bersifat struktural. Penanggulangannya adalah melalui perubahan aturan dimana pemberian kredit berikutnya tidak lagi berdasarkan pada jumlah tunggakan yang macet (≥ 20 persen), tetapi berdasarkan pada jumlah kredit yang telah dikembalikan. Cara ini selain dapat menanggulangi kemacetan yang bersifat struktural karena tunggakan, juga dapat memberikan jaminan kredit yang berkelanjutan bagi petani KUD yang melunasi. Selanjutnya kondisi yang demikian diharapkan akan mendorong partisipasi petani terhadap KUD.

SEBARAN TUNGGAKAN KUD

Tunggakan KUD ada yang tersangkut di KUD, petani, kelompok tani, aparat pemerintah dan lainnya. Kasus-kasus KUD di kabupaten Luwu menunjukkan bahwa pada MT 1988/1989 dari total

tunggakan sebesar 53,75 persen, sebagian besar (26,25%) berada di tangan aparat pemerintah, 23,75 persen berada di tangan petani dan hanya sebesar 3,75 persen berada di tangan KUD. Selanjutnya pada MT 1989 dari total tunggakan sebesar 47,93 persen, sebagian besar (32,44%) di tangan petani, 10,71 persen di tangan KUD, 1,21 persen di tangan kelompok tani dan hanya sebesar 0,86 persen di tangan aparat pemerintah. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pada MT 1988/1989 persentase tunggakan yang berada di luar petani (30%) lebih besar dibanding yang berada di tangan petani (23,75%) tetapi pada MT 1989 justru sebaliknya, yang berada di luar petani hanya 15,49 persen, sedangkan yang berada di tangan petani sebesar 32,44 persen (Tabel 5). Kenyataan ini menunjukkan isu bahwa tunggakan KUD banyak tersangkut di luar petani tidak berlaku untuk kasus-kasus di kabupaten Luwu, justru sebaliknya di tangan petanilah tunggakan itu banyak tersangkut. Tunggakan yang banyak tersangkut di tangan petani juga diperlihatkan oleh kasus KUD Allaporange di kabupaten Bone dimana tunggakan yang tersangkut di tangan petani sebesar 100 persen.

Tabel 5. Prosentase tunggakan KUD pada KUD, petani, kelompok tani dan aparat di KUD kabupaten Luwu.

Nama KUD	Persentase tunggakan pada					Total
	KUD	Petani	K.Tani	Aparat	Lainnya	
MT 1988/89						
W. Kusuma	11	8	-	-	-	19
Sinar Jaya	-	14	-	74	-	88
Subur Jaya	-	28	-	30	-	58
D.Bakti	4	45	-	1	-	50
Rata-rata	3,75	23,75	-	26,25	-	53,75
MT 1989						
Larempeng	-	12	17	2	9	40
Suli	10	14	-	-	-	24
Belopa	-	8	-	-	-	8
Bajo	11	57	-	-	-	68
Walengreng	-	88	-	-	-	88
Tarete	10	34	-	-	-	44
Lamase	11	22	-	-	-	33
Saurasirua	61	21	-	-	-	82
Sidomukti	-	2	-	-	29	31
S.Kasutuwu	-	58	-	-	-	58
J.Lestari	-	55	-	-	-	55
Giat	25	24	-	-	-	49
Bulung Lima	12	64	-	-	-	81
Takdir	10	-	-	10	-	20
Rata-rata	10,71	32,44	1,21	0,86	2,71	47,93

Sumber: Laporan Tahunan Kantor Departemen Koperasi Tahun Kabupaten Luwu Tahun 1989 dan 1990.

Tunggakan KUT di KUD Allaporange yang berada di tangan petani sebesar 100 persen tersebut karena petani belum mau membayar yang disebabkan oleh harga gabah pada musim panen rendah. Mereka menunda pembayaran sampai harga gabah meningkat. Di KUD tersebut sering terjadi pada musim panen harga gabah menurun dan KUD tidak mau membeli karena KUD tidak mempunyai sarana penyimpanan dan penjemuran. Ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik dalam pemasaran produksi pertanian sangat membantu kelancaran pengembalian kredit petani.

Hasil yang berbeda terjadi pada kasus-kasus KUD di kabupaten Wajo dan Sidrap. Tunggakan KUT yang tersangkut di tangan KUD Wajo diperkirakan sebesar 95 persen, hanya 5 persen saja yang berada di tangan petani (keterangan Kandep Koperasi*). Kasus pada KUD Amanah kabupaten Sidrap menunjukkan tunggakan KUT di tangan KUD sebesar 65,1 persen, sedangkan di tangan petani hanya sebesar 34,82 persen (Tabel 7). Dalam kasus KUD Amanah ini, walaupun tunggakan lebih banyak tersangkut di tangan KUD dibanding di tangan petani, namun KUD selalu berusaha melunasi tunggakan KUT petani kepada pemerintah. Selama MT 1987/1988 sampai dengan 1988/1989 KUD telah melunasi hutang KUT petani kepada BRI.

Tabel 6. Tunggakan KUT pada KUD dan petani di KUD Allaporange kabupaten Bone.

Tahun	Jumlah tunggakan (Rp)		
	KUD	Petani	Total
1988/1989	—	—	—
1989	—	—	—
1989/1990	—	45.580.000 (100)	4.358.000 (100)

Sumber: Laporan Tahunan KUD Allaporange Tahun 1989 dan 1990.

Tabel 7. Tunggakan KUT pada KUD dan petani pada KUD Amanah kabupaten Sidrap.

Tahun	Jumlah tunggakan (Rp)		
	KUD	Petani	Total
1987/1988	—	7.810.825	0
1988	—	7.843.293	0
1988/1989	—	18.046.501	0
1988/1989	67.785.757 (65,18)	36.211.243 (34,82)	103.997.000 (100)

Sumber: Laporan Tahunan KUD Amanah Tahun 1988, 1989 dan 1990.

Dari fakta-fakta di atas, terlihat bahwa memang beberapa KUD ada yang menyalahgunakan pengembalian KUT tetapi juga tidak sedikit petani yang enggan membayar pengembalian KUT.

PERSEPSI TERHADAP PAKET KUT

Persepsi terhadap paket KUT didekati dari informasi kelompok tani. Persepsi kelompok tani terhadap paket KUT meliputi benih, pupuk dan obat-obatan. Dari 3 unsur paket tersebut, dua unsur yaitu benih dan obat-obatan sering tidak dimanfaatkan petani, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) mutu benih KUT sama dengan benih lokal (Tabel 8). Cara produksi benih lokal secara baik sudah dikenal lama di beberapa daerah Sulawesi Selatan seperti *Matako* di Sidrap dan *ditako-tako* di Wajo. Dengan pertimbangan bahwa bibit lokal tidak perlu dibeli dan mutunya sama dengan benih KUT, banyak petani tidak memanfaatkan paket benih tersebut, (2) jenis obat-obatan sering dipandang oleh petani tidak sesuai dengan kebutuhannya lebih-lebih kalau kebetulan tidak ada serangan hama dan penyakit. Ini disebabkan karena obat-obatan fungsinya sangat kondisional sekali, hanya digunakan pada saat ada serangan hama dan penyakit.

Dalam situasi yang demikian sering terjadi pertentangan antara aparat pertanian dengan petani. Di satu pihak aparat pertanian dibebani oleh sasaran keberhasilan penerapan teknologi yang sempurna agar tercapai target produksi yang akan melahirkan target KUT, dan di pihak lain petani dihadapkan oleh kenyataan pengembalian KUT. Hal itulah yang diduga mempengaruhi kesenjangan target penyaluran dan realisasi KUT.

Sering adanya beberapa unsur paket KUT yang tidak dimanfaatkan petani dan tidak tepat waktu datangnya paket tersebut menyebabkan tertumpuknya barang tersebut di KUD yang pada akhirnya menyebabkan pada besarnya tunggakan KUD.

*) Perkiraan tunggakan yang tersangkut di KUD Wajo Raya dapat diperoleh dari kantor Departemen Koperasi Kabupaten Wajo, karena saat penelitian di KUD tersebut sedang ada pemeriksaan mengenai tunggakan KUT oleh pihak berwajib.

Tabel 8. Persepsi kelompok tani terhadap paket KUT.

Uraian	Kabupaten			
	Sidrap	Luwu	Wajo	Bone
Nama Kelompok Tani Siporeamoe	Sukaharapan	Siamasinge	Selli	
- Kualitas benih KUT dibanding lokal	sama	sama	sama	sama
- Obat-obatan	tdk.sesuai	tdk.sesuai	tdk.sesuai	tdk.sesuai
- Tepat waktu	tdk.tepat	tdk.tepat	tdk.tepat	tdk.tepat

Sumber: Syafa'at, N., dan B. Sayaka (1990).

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Di Sulawesi Selatan, KUT berpengaruh terhadap penggunaan sarana produksi pupuk dan insektisida. Makin tinggi realisasi penyaluran KUT makin tinggi penggunaan sarana produksi oleh petani. Penyaluran KUT yang meningkat juga mendorong peningkatan peranan Insus dalam produksi padi. Dengan demikian upaya peningkatan produksi padi di Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan peningkatan penyaluran KUT.
2. Penyebab utama rendahnya penyaluran KUT adalah adanya kemacetan yang bersifat struktural sebagai akibat aturan yang tidak membolehkan KUD mengambil kredit berikutnya apabila tunggakan kredit sebelumnya lebih dari 20 persen. Cara untuk mengatasi kemacetan penyaluran kredit yang bersifat struktural tersebut adalah dengan mengadakan perubahan peraturan tersebut yaitu penyaluran KUT berikutnya *didasarkan* pada jumlah kredit sebelumnya yang sudah dibayar.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tunggakan KUT adalah mengusahakan penyesuaian paket KUT dengan kebutuhan petani. Bagi unsur paket KUT yang dapat dipenuhi oleh petani seperti bibit tidak perlu disediakan. Sarana produksi obat-obatan perlu dipertimbangkan untuk dijadikan paket kondisional artinya dapat dijadikan paket apabila ada serangan hama dan penyakit pada tanaman, sehingga meringankan beban petani. Untuk meng-

hindari hal yang tidak diinginkan seperti tidak tersedianya obat-obatan yang sewaktu-waktu adanya serangan hama dan penyakit, maka KUD diharuskan menyediakan stock obat-obatan penting. Tentunya stock obat-obatan tersebut merupakan biaya bagi KUD. Disarankan biaya tersebut dapat dibebankan kepada pemerintah mengingat kemampuan modal KUD sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, B. dan N. Syafa'at. 1989. *Rekayasa Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa di Sulawesi Selatan Tahap I. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.*
- Mosher, A.T., 1966. *Getting Agricultural Moving* Frederich. A & Pragur, Inc. Boston.
- Saefudin, A.M. 1980. *Perkreditan Petani Kecil*. Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jakarta.
- Soentoro dan S. Bahri. 1988. *Dampak Program Pembangunan Pertanian Terhadap Tenaga Kerja, Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Pedesaan Sulawesi Selatan*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Syafa'at, N. 1989. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Teknis Relatif dan Sikap Petani dalam Menghadapi Resiko Produksi pada Usahatani Padi Sawah di Lahan Beririgasi Teknis*. Thesis Magister Sains Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Syafa'at, N., dan B. Sayaka. 1990. *Rekayasa Kelembagaan Sosial Ekonomi Desa di Sulawesi Selatan Tahap II. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Agro Ekonomi, Bogor.*
- Tatuh, J., 1986. *Kredit untuk Konservasi Tanah dan Pengembangan Usahatani Lahan Kering di Bagian Hulu DAS Citanduy*. Thesis, FPS - IPB, Bogor.